



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI JAWA BARAT



Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI JAWA BARAT



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL PROVINSI JAWA BARAT
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: 978-602-5745-15-7

No. Publikasi: 32550.1807

No. Katalog: 9102067.32

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm

Jumlah Halaman: vi + 31 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Analisis Statistik

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Bandung, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Barat

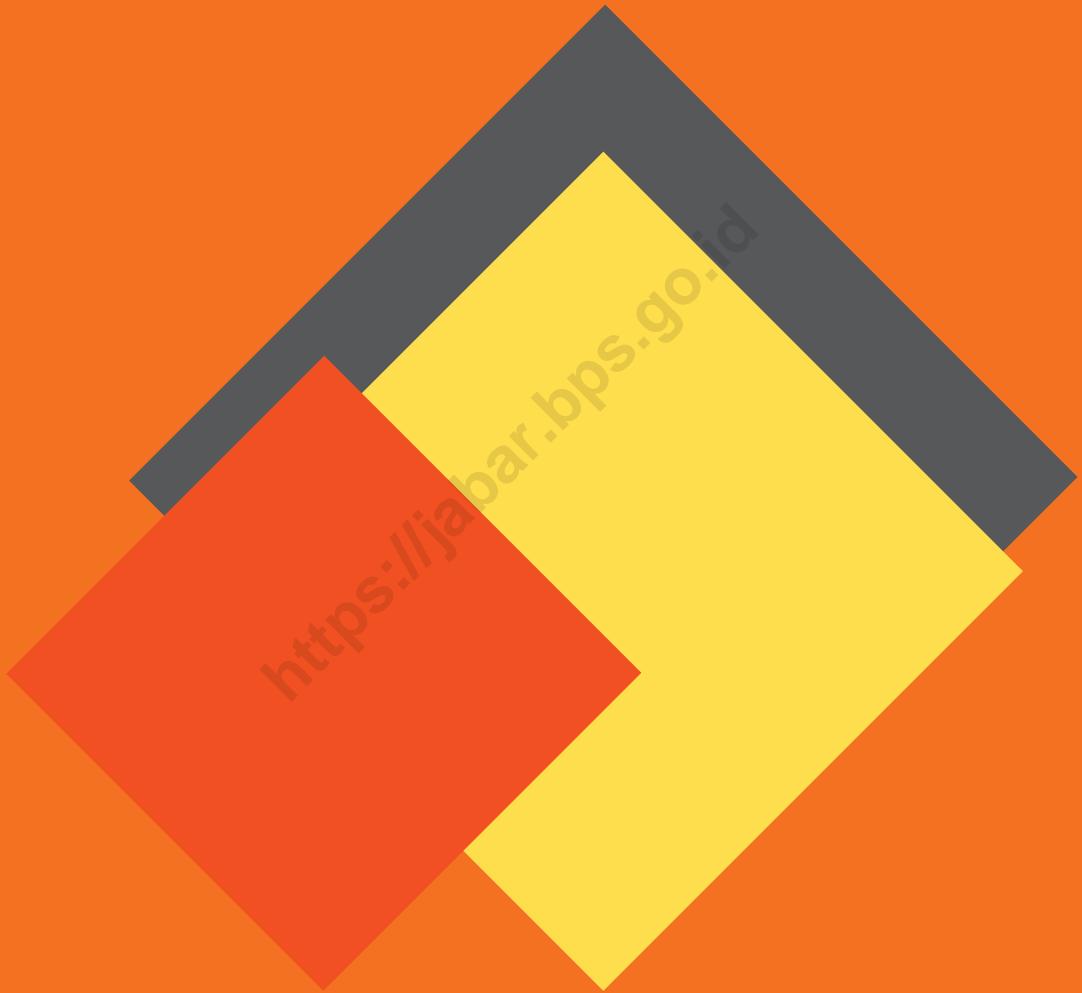
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dody Herlando'.

Dody Herlando



Daftar Isi

KATA PENGANTAR_____	iii
DAFTAR ISI_____	v
PENDAHULUAN_____	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI JAWA BARAT_	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK_____	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA _____	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN_____	17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN_____	21
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG_____	27



Pendahuluan

Dunia usaha di Jawa Barat pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 4,5 juta usaha atau 98,84 persen dari total usaha nonpertanian di Jawa Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Jawa Barat lebih dari 9,7 juta orang atau sekitar 74,07 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia termasuk Jawa Barat pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



<https://jabar.bps.go.id>

**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
JAWA BARAT**

Bagian

1

<https://jabar.bps.go.id>

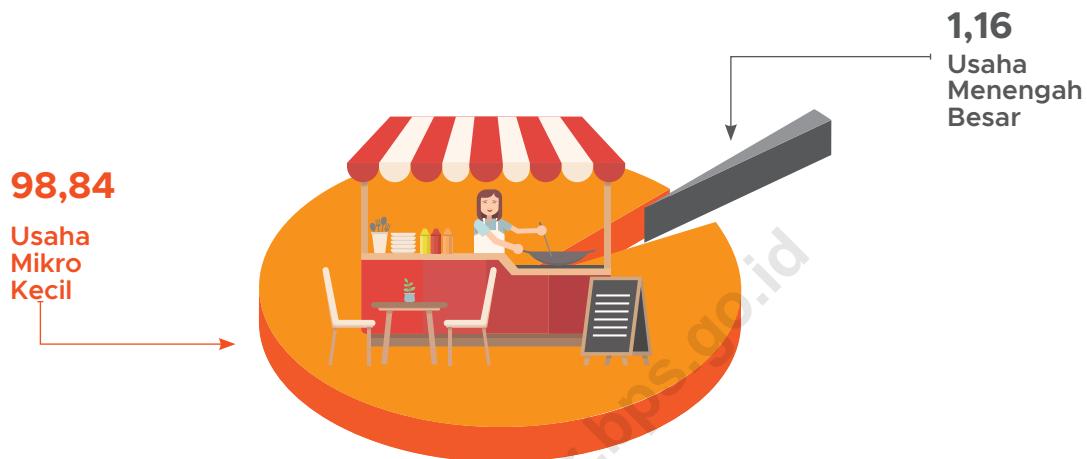
UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Barat. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan

Persentase UMK di Jawa Barat mencapai 98,84 persen dari total jumlah usaha nonpertanian di Jawa Barat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 2,1 juta usaha atau mencapai 47,44 persen. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing sejumlah 860.312 usaha (18,93 persen) dan lebih 600.720 usaha (lebih dari 13,12 persen).

Konsentrasi UMK tersebar pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat. Terdapat tiga kabupaten/kota yang persentase UMKnya lebih dari 7 persen terhadap total UMK Jawa Barat. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung memiliki kontribusi sebesar 22,99 persen total UMK Jawa Barat.

**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PROVINSI
JAWA BARAT**

Gambar 1.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Kab. Bogor	367.271	8,08
Kab. Bandung	347.573	7,65
Kota Bandung	330.314	7,27
Kab. Sukabumi	266.729	5,87
Kab. Garut	258.314	5,68
Kab. Cirebon	249.823	5,50
Kab. Cianjur	249.061	5,48
Kab. Karawang	229.031	5,04
Kab. Bekasi	227.110	5,00
Lainnya	2.020.648	44,45
Total	4.545.874	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://jabar.bps.go.id>

Jumlah UMK sangat besar di Jawa Barat tentunya akan berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017, pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,22 persen, terbanyak pada lulusan SMK yang mencapai 16,80 persen. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Jawa Barat, salah satunya disebabkan rendahnya keahlian soft skill lulusan SMK khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji. Selain SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada lulusan SMA yang mencapai 10,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016 memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 9 juta tenaga kerja, atau sekitar tiga perempat tenaga kerja nonpertanian di Jawa Barat.

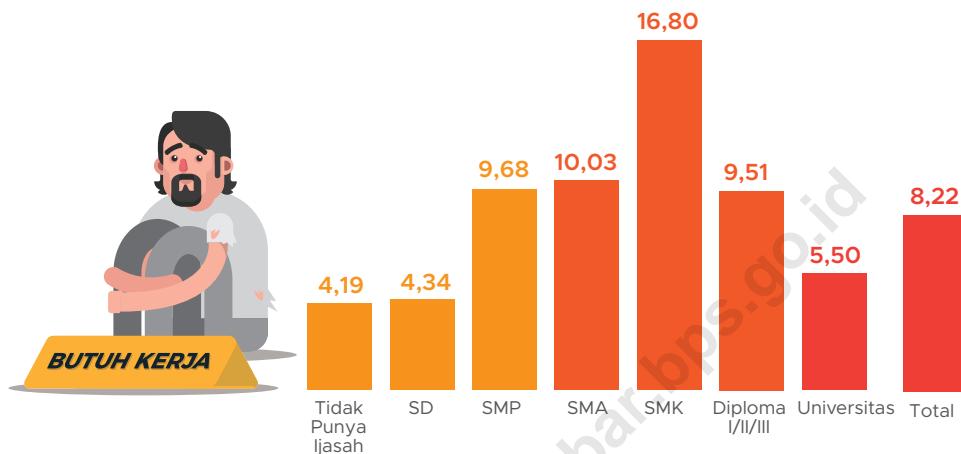
Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan

Sepeda Motor (kategori G) mencapai 3,98 juta jiwa atau mencapai dua perlima dari tenaga kerja pada UMK nonpertanian. Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK nonpertanian.

Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Konstruksi memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja. Kemudian kategori Pendidikan dengan rata-rata 9 tenaga kerja per usaha. Sementara UMK kategori lainnya rata-rata mampu menyerap sekitar 2 pekerja. Secara umum rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Jawa Barat hanya sebesar 2 pekerja.

**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran Jawa Barat menurut Pendidikan, 2017



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2017, dan Berita Resmi Statistik No. 64/11/2017

Gambar 2.2.
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasar Skala Usaha, 2016

25,93%

Usaha Menengah Besar



74,07%

Usaha Mikro Kecil

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.3.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.1
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Jawa Barat, 2016

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.156.577	3.981.293	2
C. Industri Pengolahan	600.720	1.673.252	3
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	860.312	1.569.177	2
P. Pendidikan	89.409	825.579	9
RS. Jasa Lainnya	181.017	403.469	2
H. Pengangkutan dan pergudangan	295.782	357.279	1
Kategori Lainnya	77.715	220.203	3
F. Konstruksi	18.216	214.671	12
J. Informasi Dan Komunikasi	121.387	184.134	2
MN. Jasa Perusahaan	54.241	155.412	3
L. Real Estat	90.498	117.926	1

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://jabar.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja yang besar UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Jawa Barat, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 95,15 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga

bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet dibawah 11 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 6,97 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

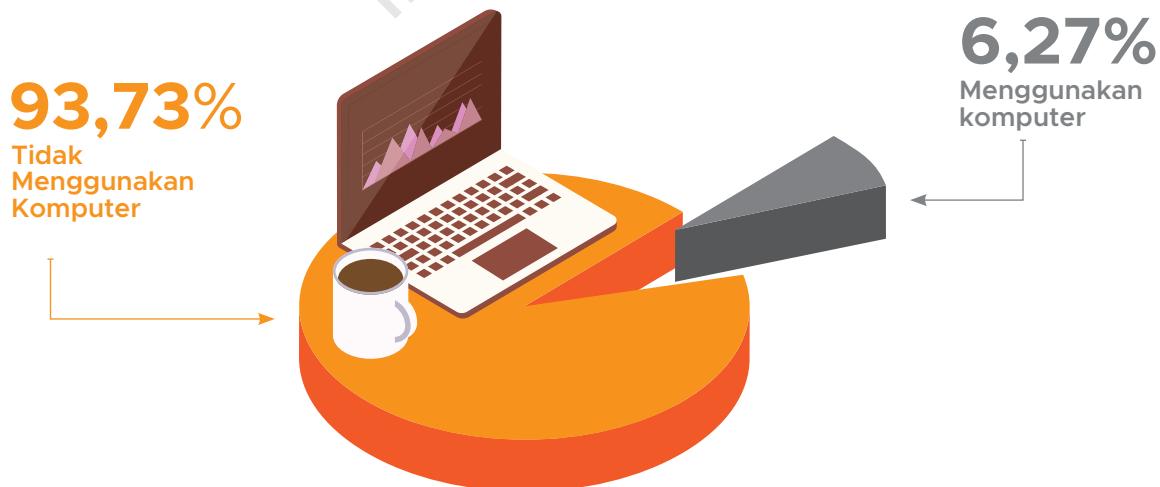
Di antara sektor Nonpertanian di Jawa Barat, UMK Aktivitas Pendidikan; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2016



Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016

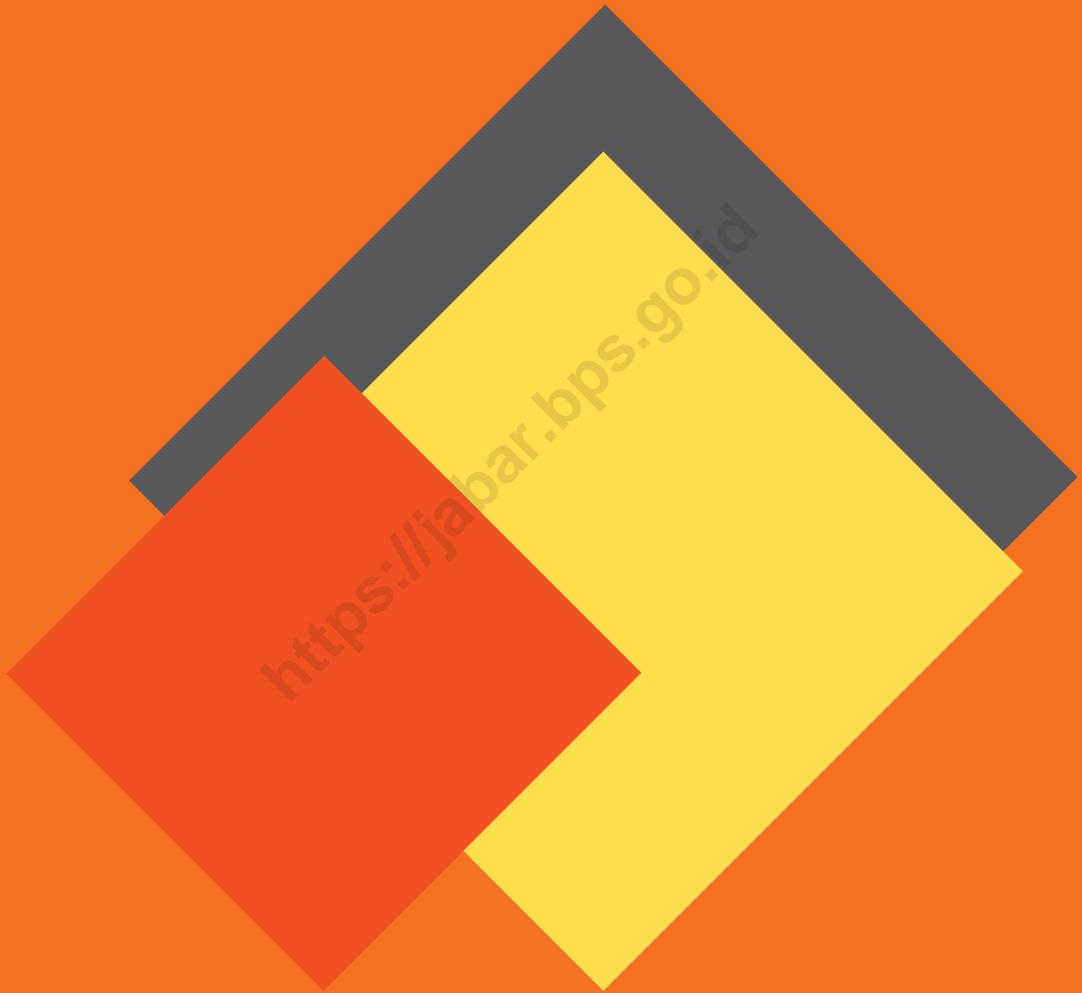


Tabel 3.1.
Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet, dan Menjalinkan Kemitraan di Jawa Barat, 2016

Kategori	Berbadan Hukum	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalinkan Kemitraan
C. Industri Pengolahan	5,29	4,95	9,68	12,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,69	3,90	8,19	6,96
H. Pengangkutan dan pergudangan	2,79	2,02	7,26	3,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,47	1,54	4,68	2,55
J. Informasi dan Komunikasi	2,16	30,48	44,74	12,21
L. Real Estat	1,35	1,61	5,03	0,51
M,N. Jasa Perusahaan	10,53	31,25	31,90	12,02
P. Pendidikan	75,33	65,40	60,91	14,28
R,S Jasa Lainnya	3,92	9,72	16,69	6,23
Kategori Lainnya	26,92	21,44	23,58	15,11

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Bagian

4

<https://jabar.bps.go.id>

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan sekitar 21,13 persen UMK dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. Kategori yang paling banyak dibantu buruh tidak dibayar adalah aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I).

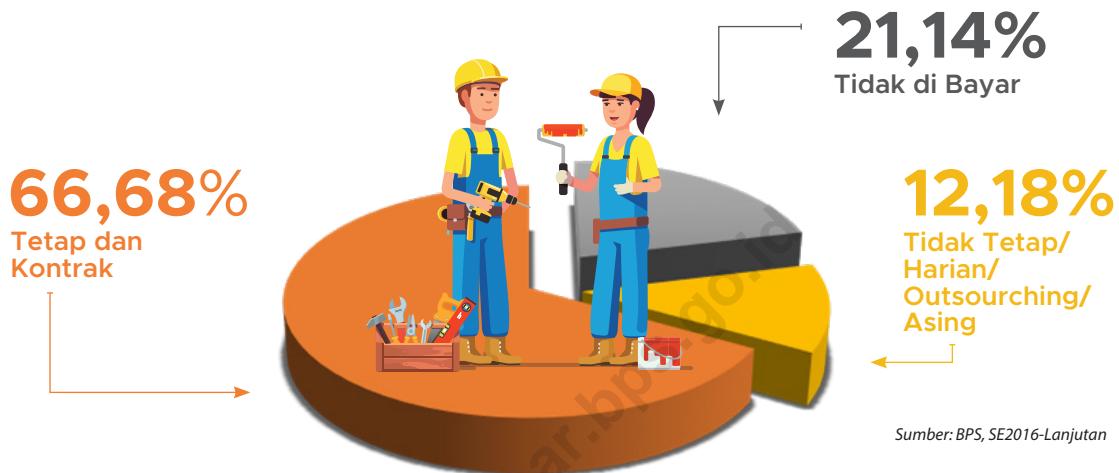
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan 37,12 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat

diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Hampir 50 persen pengelola berpendidikan SD ke bawah, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SMA juga cukup besar mencapai 24,42 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

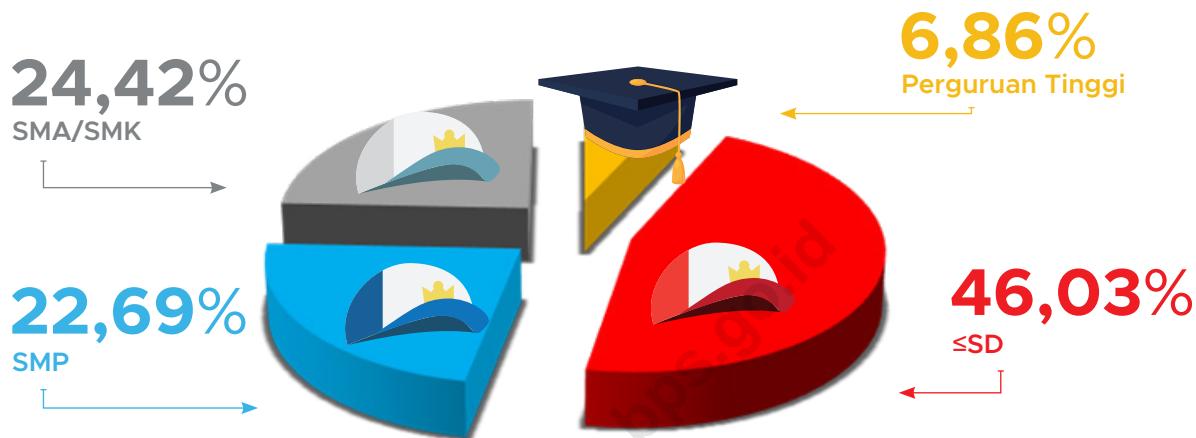
Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Pekerjaan, 2016



Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2016



Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.1
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerjaan di Jawa Barat, 2016

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing/Asing	Tidak di Bayar	Total
C. Industri Pengolahan	59,32	22,41	18,28	100,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	65,12	7,46	27,42	100,00
H. Pengangkutan dan pergudangan	86,94	4,87	8,19	100,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	66,15	5,22	28,63	100,00
J. Informasi dan Komunikasi	73,50	2,86	23,64	100,00
L. Real Estat	78,85	2,10	19,05	100,00
M,N. Jasa Perusahaan	62,06	26,60	11,34	100,00
P. Pendidikan	86,69	10,20	3,11	100,00
R,S. Jasa Lainnya	66,41	23,16	10,43	100,00
Kategori Lainnya	52,40	42,27	5,33	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://jabar.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

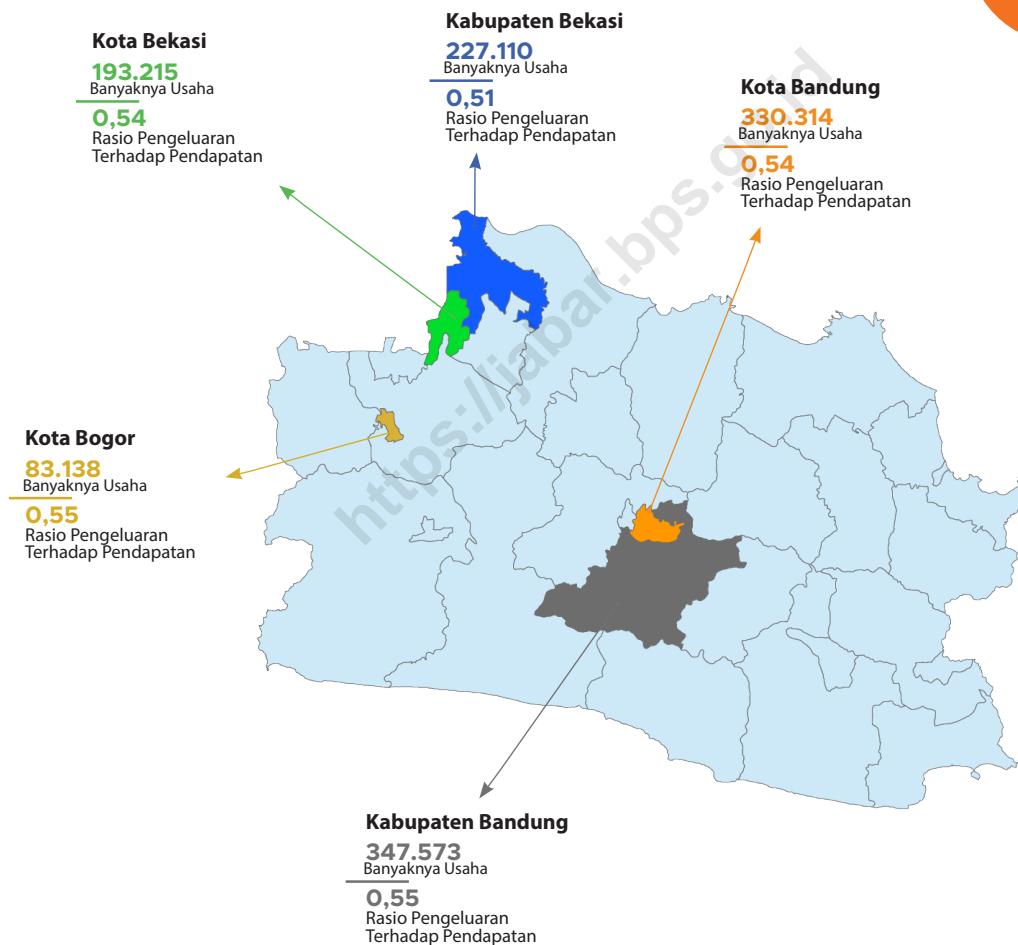
Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan kondisi yang stabil. Namun, sekitar 30,38 persen UMK di Jawa Barat menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, sektor UMK secara keseluruhan mampu menghasilkan pendapatan mencapai lebih dari Rp 916 triliun.

Selain laba usaha, rasio cost to income juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK pada kategori L (Real Estat) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,28. Selanjutnya, Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) berada di urutan ke dua usaha yang menguntungkan dengan rasio 0,33.

Namun demikian, Kategori D, L, N, R dan S bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Di Jawa Barat, aktivitas Konstruksi memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 25,54 juta per pekerja pada tahun 2017. Selanjutnya, Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) memberikan balas jasa mencapai 24,24 juta per pekerja pada tahun yang sama.

Gambar 5.1.
Banyaknya Usaha/Perusahaan dan Rasio Pengeluaran terhadap
Pendapatan UMK Menurut Wilayah Provinsi Jawa Barat, 2017

5 Kab/Kota
(dengan rasio
terendah
di Provinsi
Jawa Barat



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
Persentase UMK menurut Perolehan Laba Tahun 2016
dibanding Tahun 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.
Rasio Pendapatan terhadap pengeluaran Menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 5.1
Rata-Rata Balas Jasa dan Upah per Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori
(Juta Rupiah), 2017

Kategori	Balas Jasa
B. Pertambangan dan Penggalian	15,62
C. Industri Pengolahan	16,88
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	12,17
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	15,20
F. Konstruksi	25,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	16,12
H. Pengangkutan dan Pergudangan	16,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	14,64
J. Informasi dan Komunikasi	13,03
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	19,48
L. Real Estat	11,40
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	23,64
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12,40
P. Pendidikan	21,48
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	24,24
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	10,43
S. Aktivitas Jasa Lainnya	15,28
Total	17,62

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



<https://jabar.bps.go.id>

**PROSPEK
UMK DI
MASA
MENDATANG**

Bagian

6

<https://jabar.bps.go.id>

RPJMN 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi pbisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Di Jawa Barat, Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 42 persen.

Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Jawa Barat 82,7 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya persaingan dan permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi. Sekitar 68 persen UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMK sebetulnya sudah sangat

terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Jawa Barat telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMK (Peraturan Bank Jawa Barat Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 11,7 persen usaha yang memperoleh kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak menjadikan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai sumber pemberi modal/ usaha utamanya adalah karena alasan bunga tinggi dan tidak memiliki agunan.

**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

Gambar 6.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.2.
Persentase UMK Menurut Kendala, 2017



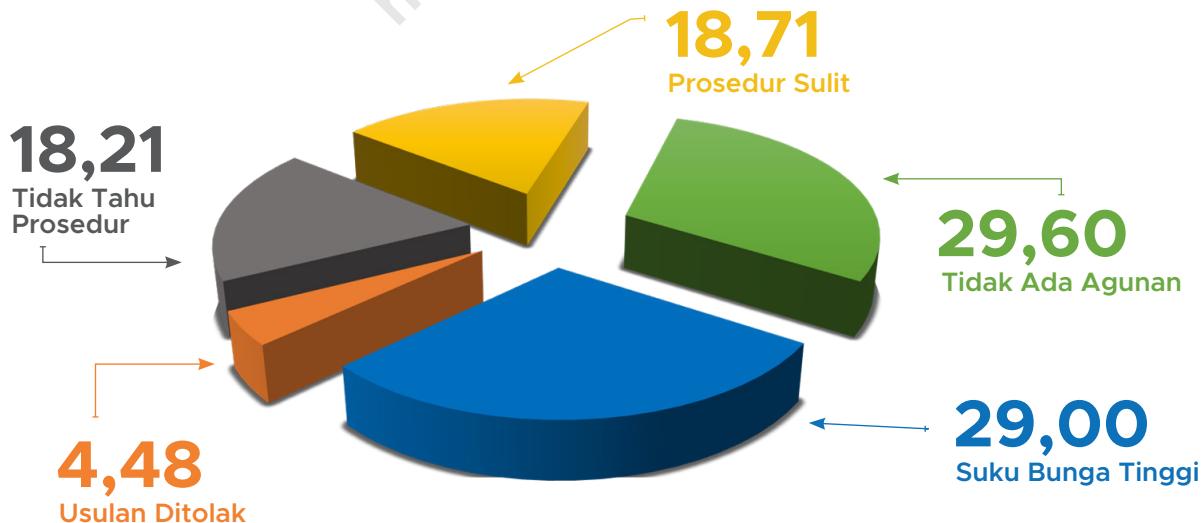
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.3.
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.3.
Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



<https://jabar.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustofa No.43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp : (022) 7272595, 7201696, Fax : (022) 7213572
Homepage : <http://jabar.bps.go.id> E-mail : bps3200@bps.go.id

ISBN 978-602-5745-15-7

